



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol Gedung Buncai Lantai II Kelurahan Tarempa

e-mail bakesbangpol@anambaskab.go.id

T A R E M P A

Kode Pos : 29791

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Aparatur Sipil Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Indikator Kinerja Individu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 76);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu Pejabat Administrator, Pengawa, Fungsional dan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh seluruh pejabat dan pelaksana dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikumudikan hari terdapat kekliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada tanggal : 31 Januari 2023

**Plt. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



AKMARUZZAMAN, S.Ag., MPD
NIP. 19720403 201101 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas
 Nomor : 14 Tahun 2023
 Tanggal : 31 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tugas : Memberikan pelayanan administratif di lingkungan Bakesbangpol

Fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Bakesbangpol;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Bakesbangpol;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Bakesbangpol;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Bakesbangpol;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Bakesbangpol; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

No .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan administrasi dan urusan umum	Terkelolanya administrasi dan urusan umum	<u>administrasi dan urusan umum yang terkelola dgn baik</u> x 100% jumlah urusan administrasi dan urusan umum	Bakesbangpol
2	Pelaksanaan urusan kepegawaian	Terlaksananya urusan kepegawaian	<u>urusan kepegawaian yg terkelola dengan baik</u> x 100% jumlah urusan kepegawaian	
3	Pelaksanaan urusan keuangan	Terlaksananya urusan keuangan	<u>urusan keuangan yang terkelola dengan baik</u> x 100% jumlah urusan keuangan	
4	Pelaksanaan urusan program	Terlaksananya urusan program	<u>urusan program yang terkelola dengan baik</u> x 100% jumlah urusan program	

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS : Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

URAIAN TUGAS :

1. memformulasikan sajian untuk analisis;
2. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
5. menguji alternatif kriteria dan model;
6. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
7. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
8. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
9. menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
10. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
11. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
12. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian	Jumlah dokumen rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian	Jumlah dokumen rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian yang disusun	- Renstra - Renja - RKA/DPA
2	Terpenuhinya penyusunan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan	Jumlah dokumen urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan	Jumlah dokumen urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan yang disusun	- Surat menyurat - Kelengkapan urusan-urusan ASN

PERENCANA AHLI MUDA

TUGAS : Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

URAIAN TUGAS :

1. memformulasikan sajian untuk analisis;
2. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
5. menguji alternatif kriteria dan model;
6. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
7. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
8. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
9. menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
10. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
11. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
12. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	- Renstra - PK - RKT/Renja - RKA/DPA - LkjIP - LPPD - LKPj
2	Terpenuhinya penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	Laporan pelaksanaan program dan kegiatan

BENDAHARA PENGELUARAN

TUGAS : Mengelola administrasi keuangan dan membuat laporan mengenai Permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban

FUNGSI :

- Mengumpulkan data/informasi pengajuan penggunaan anggaran
- Memeriksa kelengkapan pengajuan pencairan anggaran
- Membuat kelengkapan pengajuan anggaran (SPP dan SSP)
- Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
- Mengajukan SPM kepada Kepala Satuan
- Mencatat dan mengarsip berkas pengajuan anggaran

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya bahan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah verifikasi SPJ dan input proses pengajuan	Jumlah SPP dan SPM yang diajukan	Bendahara Pengeluaran
		Jumlah pembayaran, pengelolaan, penyimpanan dan pengaturan keluar masuk dana	Jumlah berkas laporan penerimaan dan pengeluaran	
		Jumlah penyiapan laporan pertanggung jawaban (SPJ Belanja-Fungsional)	Jumlah bahan yang di siapkan buat laporan pertanggungjawaban	
2	Tersedianya bahan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah penyiapan laporan pencairan kepada pengguna anggaran	Jumlah berkas laporan realisasi penyerapan anggaran kegiatan	
		Jumlah penyiapan dan penyimpanan berkas SPJ	Jumlah yang di SPJ kan	
		Jumlah penyiapan buku kas umum dan register penutupan kas	Jumlah yang di kerjakan di buku kas umum dan register penutupan kas	
		Jumlah penyiapan SSP (Surat Setoran Pajak)	Jumlah pajak yang di bayarkan	

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Tugas : menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik

- Fungsi :
1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 3. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 4. Melaksanakan administrasi pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya laporan Ipoleksosbudhankam	Jumlah Laporan yang disusun	Jumlah data/bahan/laporan terkait dengan isu ipoleksosbudhankam di daerah	Laporan/ Data/ Informasi
2.	Terselenggaranya fasilitasi rapat koordinasi kewaspadaan dini di daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	Jumlah notulensi rapat dalam pelaksanaan rapat koordinasi	Giat pelaksanaan rakor
3.	Terselenggaranya fasilitasi rapat koordinasi penanganan konflik di daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	Jumlah notulensi rapat dalam pelaksanaan rapat koordinasi	Giat pelaksanaan rakor
4.	Terlaksananya rapat koordinasi pimpinan daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi FORKOPIMDA	Jumlah notulensi rapat yang dihasilkan dalam rangka perumusan kebijakan di daerah	Giat pelaksanaan rapat FORKOPIMDA
5.	Terlaksananya sosialisasi kebijakan program kerja RAN-PE di daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Giat penyelenggaraan RAN-PE
6.	Terbentuknya forum/ tim koordinasi dalam rangka peningkatan kerjasama dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Jumlah Forum/ Tim Koordinasi yang dibentuk	Jumlah surat keputusan yang disusun	SK yang di susun dan ditandatangani oleh Kepala Daerah

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Tugas : melaksanakan kajian dan analisis kebijakan

Fungsi : melaksanakan kajian dan analisis kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan rumusan kebijakan di tingkat pusat dan daerah (dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik)

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya dokumen yang menyediakan data/ informasi terkait isu, masalah kebijakan	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang menyediakan data/ laporan/ informasi terkait isu, masalah kebijakan	Laporan/ Data/ Informasi
2.	Terselenggaranya FGD terkait masalah, isu kebijakan	Jumlah Pelaksanaan FGD	Jumlah notulensi rapat/ policy paper yang dihasilkan dalam pelaksanaan FGD Kegiatan terkait isu, masalah kebijakan	Giat pelaksanaan FGD
3.	Pelaksanaan kerjasama dan konsultasi terhadap pemangku kepentingan	Jumlah pelaksanaan penugasan	Jumlah Laporan kegiatan/ hasil konsultasi terhadap pemangku kepentingan/ pejabat public	Laporan Kegiatan
4.	Mengikuti kegiatan seminar/ sosialisasi/webinar/ bimtek terkait kebijakan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang diikuti terkait dengan seminar/webinar/ sosialisasi/bimtek terkait dengan kebijakan	Sertifikat Kegiatan dan Bahan Paparan

PERENCANA KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA

TUGAS : Memimpin dan melaksanakan kegiatan sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

URAIAN TUGAS :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan ;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunana umat beragama dan penghayat kepercayaan;
4. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaa, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya pelayanan yang berkualitas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	Indeks kepuasan masyarakat di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	- RENJA - RKA/DPA - PK
2	Menurunnya jumlah kasus pelanggaran demokrasi terhadap kelompok agama, etnis dan gender	Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	Jumlah Laporan Dokumen pelanggaran demokrasi terhadap kelompok agama, etni dan gender	- RENJA - RKA/DPA - PK
		Jumlah kasus tindak/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis dan kelompok	Jumlah kasus tindak/ pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis dan kelompok yang tersusun	- RENJA - RKA/DPA - PK
3.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional	Jumlah pelajar/masyarakat yang memperoleh Pendidikan bela negara	Jumlah tercapainya pelajar/masyarakat yang memperoleh pendidikan bela negara	- RENJA - RKA/DPA - PK
		Jumlah masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan sosial budaya	Jumlah tercapainya masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan sosial budaya	- RENJA - RKA/DPA - PK
		Jumlah pelajar/masyarakat yang memperoleh pemahaman bahaya narkoba	Jumlah tercapainya pelajar/masyarakat yang memperoleh Pendidikan Pemahaman bahaya narkoba	- RENJA - RKA/DPA - PK

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUGAS : Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kerja organisasi;
2. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
3. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan;
4. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi untuk menganalisis kebijakan;
5. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan;
6. Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan;
7. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan;
8. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
9. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
10. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya pelayanan yang berkualitas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	Jumlah dokumen program kerja di Bidang bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Jumlah dokumen program kerja di Bidang bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang disusun	- Renja - RKA/DPA - PK
		Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama yang tersusun	- Renja - RKA/DPA - PK

		Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama yang terlaksana	- Renja - RKA/DPA - PK
2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional	Jumlah pelajar/masyarakat yang memperoleh pendidikan bela negara	Jumlah pelajar/masyarakat yang memperoleh pendidikan bela negara dalam kegiatan sosialisasi	- RKA/DPA - PK
		Jumlah masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan sosial budaya	Jumlah masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan sosial budaya	- RKA/DPA - PK

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA AGAMA

Tugas : Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya agama sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan pelayanan fungsional.

Fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya agama;
2. Melakukan analisis kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya agama
3. Menyusun rumusan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya agama;
4. Memberikan rekomendasi kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya agama;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama	Jumlah koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama	Koordinasi bisa dilakukan secara internal maupun lintas sektor	Dokumen hasil analisis, telaah staf, notulensi, Surat Keputusan, Surat Edaran, surat undangan, lembar konsultasi, dokumentasi, absensi, data elektronik, dll
2.	Terlaksananya koordinasi kegiatan dan laporan P4GN dengan Perangkat Daerah lain	Jumlah koordinasi kegiatan dan laporan P4GN dengan Perangkat Daerah lain	Koordinasi dilakukan pada 33 Perangkat Daerah	Dokumen laporan, lembar konsultasi, notulensi, dokumentasi, absensi, surat undangan, data elektronik, monitoring dan evaluasi, dll
3.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelajar/ masyarakat yang memperoleh pendidikan bela negara	Pelaksanaan bisa dilakukan secara elektronik maupun non elektronik Target jumlah pelajar/ masyarakat yang memperoleh pendidikan bela negara 25 orang	Notulensi, dokumentasi, absensi, surat undangan, data elektronik, spanduk, dokumen presentasi, dokumen laporan
4.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelajar/ masyarakat yang memperoleh pemahaman bahaya narkoba	Pelaksanaan bisa dilakukan secara elektronik maupun non elektronik Target jumlah pelajar/ masyarakat yang memperoleh pemahaman bahaya narkoba 45 orang	Notulensi, dokumentasi, absensi, surat undangan, data elektronik, spanduk, dokumen presentasi, dokumen laporan

PERENCANA PEMANDU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

TUGAS : Melakukan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

URAIAN TUGAS :

1. Menyiapkan materi panduan kerukunan umat beragama secara baik sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pemanduan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang;
3. Melaksanakan tugas monitoring sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama secara periodik;
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pemanduan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang: dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang. yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya pelayanan yang berkualitas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Kerja di Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Kerja yang tersusun	- RENJA - RKA/DPA - PK
		Terlaksanannya Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi FKUB	- RKA/DPA - PK
		Terlaksanannya Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	Terlaksanannya Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama yang tersusun	- RKA/DPA - PK

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- TUGAS** : Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- FUNGSI** :
- penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
 - penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
 - pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah; dan
 - melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terjaganya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia pada bidang poldagri	Jumlah laporan ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	Jelas	Laporan Masyarakat, Laporan Kepolisian, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan
		Jumlah laporan ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	Jelas	Laporan Masyarakat, Laporan Kepolisian, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan
		Jumlah laporan tindakan kekerasan atau melanggar hukum yang terorganisir dan terafiliasi dengan ormas	Jelas	Laporan Masyarakat, Laporan Kepolisian, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan

		Jumlah organisasi masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap	Jelas	Laporan Masyarakat, Laporan Kepolisian, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan
2.	Terwujudnya pelayanan publik di bidang organisasi masyarakat yang baik	Indeks kepuasan masyarakat dibidang ormas	Sesuai Permepan-RB	Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Mengaktifkan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Jumlah organisasi masyarakat yang kegiatannya mendukung program kerja pemerintah kabupaten kepulauan anambas	Minimal satu kegiatan ormas bermitra dengan Pemerintah Daerah	Laporan Kegiatan Ormas, Perangkat Daerah, Media Massa
4.	Terjaganya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia pada bidang poldagri	Jumlah laporan ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	Jelas	Laporan Masyarakat, Laporan Kepolisian, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan
		Jumlah laporan ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	Jelas	Laporan Masyarakat, Laporan Kepolisian, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan
		Jumlah laporan hak memilih atau dipilih terhambat	Jelas	Laporan Masyarakat, Laporan Kepolisian, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan
		Jumlah laporan kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	Jelas	Laporan Masyarakat, Laporan Bawaslu, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan
		Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu/Pilkada/Pilkades (Voters Turnout)	Jumlah DPT yang mencoblos/ Total DPT X 100	KPUD, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan
		Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	Jelas	Sekretariat DPRD, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan
		Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	Jelas	Laporan Masyarakat, Laporan Bawaslu, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan
		Jumlah laporan kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	Jelas	Laporan Masyarakat, Laporan Bawaslu, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan
		Persentase perempuan pengurus partai politik	Pengurus Partai Perempuan /Total Pengurus Partai X 100	Sekretariat DPRD, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan
5.	Terwujudnya pelayanan publik di bidang poldagri yang baik	Indeks kepuasan masyarakat dibidang poldagri	Sesuai Permepan-RB	Survei Kepuasan Masyarakat
6.	Mengaktifkan peran serta partai dalam politik daerah	Jumlah partai politik aktif yang mendapatkan kursi	Satu Partai minimal satu kursi	Sekretariat DPRD, Media Massa, BPS, Investigasi Mandiri, dan sumber lain yang valid/dapat dipertanggungjawabkan

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG POLDAGRI DAN ORMAS

TUGAS : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Koordinasi dibidang politik dalam negeri	Jumlah kebijakan peraturan perundang-undangan dan atau surat edaran di bidang Poldagri	Jelas	Bakesbangpol/bagian hukum setda
		Terlaksananya rapat koordinasi penguatan idiologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan Pendidikan politik	Jelas	Laporan Kegiatan / Dokumentasi Rapat
2.	Terselenggaranya pelayanan, pendataan dan pendaftaran dibidang Poldagri	Persentase proposan dana hibah parpol yang direalisasikan	Jumlah Proposal yang direalisasikan/ jumlah proposal X 100	DPA, RFK Poldagri
3.	Terlaksananya Dukungan Dana Hibah, Pembinaan dan Pemberdayaan Partai Politik	Jumlah pengurus Parpol yang memperoleh penguatan idiologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan Pendidikan politik	Jelas	Laporan Kegiatan / Dokumen tasi Rapat
		Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi Partai Politik dan Pemerintah Daerah	Jelas	Laporan Kegiatan / Dokumen tasi Rapat
		Jumlah Partai yang mendapatkan bantuan dana hibah	Jelas	Laporan Kegiatan / Dokumen tasi Rapat
		Terbentuknya tim verivikasi kelengkapan administrasi proposal permohonan bantuan hibah parpol	Jelas	Bagian Hukum Setda / Bakesabgpol

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG POLDAGRI DAN ORMAS

TUGAS : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pengawasan dan regulasi terhadap ormas	Jumlah kebijakan peraturan perundang-undangan dan atau surat edaran di bidang ormas	Jelas	Bakesbangpol/bagian hukum setda
		Terbentuknya Tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas	Jelas	Bakesbangpol/bagian hukum setda
		Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas	Jelas	Laporan Kegiatan / Dokumen tasi Rapat
2.	Terselenggaranya pelayanan, pendataan dan pendaftaran ormas secara baik	Persentase permohonan surat keterangan pendaftaran ormas yang diterbitkan	Jumlah SKT terbit / Jumlah Permohonan X 100	Bakesbangpol
3.	Terlaksananya Dukungan, pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat	Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan idiologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan Pendidikan politik	Jelas	Laporan Kegiatan / Dokumen tasi Rapat
		Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi ormas dan Pemerintah Daerah	Jelas	Laporan Kegiatan / Dokumen tasi Rapat
		Jumlah ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah	Jelas	Laporan Kegiatan / Dokumen tasi Rapat

ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT

TUGAS : Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang organisasi masyarakat

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terkumpulnya peraturan perundang-undangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan di bidang ormas	Jumlah peraturan perundang-undangan	UU/PP/PERPRES/PERMEN/PERDA/PERBUP	JDIH, Bagian Hukum SETDA
2.	Tersusunnya telaahan staf sebagai bahan rekomendasi kebijakan di bidang ormas	Jumlah telaahan staf	Jelas	Subbidang ormas
3.	Tersusunnya laporan triwulan perkembangan ormas	Jumlah laporan	Jelas	Subbidang ormas
4.	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur di Ormas	Jumlah dokumen SOP	Jelas	Subbidang ormas
5.	Tersusunnya Standar Pelayanan di bidang ormas	Jumlah dokumen SP	Jelas	Subbidang ormas
6.	Tersusunnya laporan perencanaan dan kegiatan di bidang ormas	Dokumen Perencanaan	Renja DPA, RAK, KAK, PK	Subbidang ormas
		Dokumen Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan, LRFK, Laporan Capaian Kinerja	Subbidang ormas

PENGADMINISTRASI PARTAI

TUGAS : Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian partai.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terkumpulnya peraturan perundang-undangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan di bidang poldagri	Jumlah peraturan perundang-undangan	UU/PP/PERPRES/PERMEN/PERDA/PERBUP	JDIH, Bagian Hukum SETDA
2.	Tersusunnya telaahan staf sebagai bahan rekomendasi kebijakan di bidang poldagri	Jumlah telaahan staf	Jelas	Subbidang Poldagri
3.	Tersusunnya laporan triwulan perkembangan poldagri	Jumlah laporan	Jelas	Subbidang Poldagri
4.	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur di Poldagri	Jumlah dokumen SOP	Jelas	Subbidang Poldagri
5.	Tersusunnya Standar Pelayanan di bidang poldagri	Jumlah dokumen SP	Jelas	Subbidang Poldagri
6.	Tersusunnya laporan perencanaan dan kegiatan di bidang poldagri	Dokumen Perencanaan	Renja DPA, RAK, KAK, PK	Subbidang Poldagri
		Dokumen Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan, LRFK, Laporan Capaian Kinerja	Subbidang Poldagri